

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membebaskan Warga Negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf berbeda dengan yang dilakukan pada kasus penyanderaan sebelumnya. Pada kasus ini, Indonesia tidak diperbolehkan mengirimkan pasukan militernya ke Filipina karena adanya konstitusi Filipina yang melarang keterlibatan militer asing di wilayah Filipina. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan dengan adanya tenggat waktu yang diberikan Abu Sayyaf, permintaan tebusan serta keinginan keluarga korban yang menginginkan sandera secepatnya dibebaskan. Hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia dilema dalam mengambil langkah pembebasan sandera. Maka saya ingin meneliti bagaimana upaya dari pemerintah Indonesia dalam membebaskan sepuluh Warga Negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Dari riwayat penyanderaan yang pernah di alami oleh Indonesia, kasus yang saya ambil yakni penyanderaan 10 Warga Negara Indonesia yang terjadi pada 26 Maret 2016. Melihat dari sejarah daerah Mindanao dimana tempat beroperasinya Abu Sayyaf, daerah tersebut merupakan bekas konflik bersenjata. Dimana adanya perubahan memburuknya kesejahteraan manusia, lingkungan, dan ekonomi di daerah tersebut. Serta munculnya kelompok pemberontak pemerintah. Seperti dalam kasus ini Abu Sayyaf. *Abu Sayyaf Group* merupakan sebuah kelompok yang mereformasi diri mereka dari sekelompok pemberontak yang melawan pemerintah, menjadi sebuah kelompok terorisme besar di Asia Tenggara yang

berafiliasi dengan kelompok kejahatan transnasional besar. Aksi Abu Sayyaf dapat dikategorikan menjadi tindakan terorisme yang meliputi tindakan pengeboman, penyerangan, dan pembunuhan yang mengakibatkan kematian sebanyak 288 orang warga sipil.

Langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya membebaskan sandera di dasarkan pada konsep dasar rasional dan juga tiga elemen pendukung keputusan agar dapat dikatakan rasional. Tujuan dan sasaran pemerintah Indonesia yakni melindungi kedaulatannya termasuk di dalamnya warga negara dan wilayah kekuasaannya. Maka opsi yang tersedia adalah menyelamatkan sandera melalui pembayaran tebusan, operasi militer secara langsung atau berdiplomasi. Sedangkan pertimbangan pengambilan opsi yakni didasarkan pada untung-rugi, termasuk di dalamnya keselamatan warga negara yang menjadi sandera merupakan prioritas utama.

Dengan menggunakan 4 konsep pembuatan kebijakan luar negeri, maka pemerintah mengambil opsi untuk mengambil diplomasi menjadi upaya dalam menyelamatkan sandera. Pemerintah Indonesia lebih mengedepankan negosiasi dalam diplomasi yang dilakukan. Dalam kasus kali ini, Indonesia menggunakan upaya diplomasi total dimana Indonesia mengakumulasikan seluruh sumber daya yang dimiliki melalui berbagai pendekatan baik formal maupun informal dengan berbagai pihak. Meskipun Indonesia tidak diperbolehkan melakukan operasi militer secara langsung dikarenakan adanya konstitusi Filipina yang melarang hal tersebut, namun Indonesia tetap menggunakan pasukan militernya di perbatasan

sebagai bentuk pencegahan apabila Indonesia diizinkan mengambil alih upaya pelepasan sandera dan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Pihak yang terlibat dalam proses pembebasan sandera yakni dari pihak Kementerian Luar Negeri, tokoh masyarakat dari Indonesia maupun Filipina, serta Inteligen Indonesia dan Filipina. Selain itu peran NGO seperti para peneliti di bidang konflik dan terorisme juga dilibatkan karena mereka memiliki orang yang dikenal di daerah tersebut sehingga lebih bisa mengetahui keadaan disana. Setiap tim memiliki fungsi masing-masing namun tetap dengan tujuan yang sama, yakni membebaskan sandera. Tim Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi formal dengan pemerintah Filipina. Sedangkan tim yang terdiri dari Inteligen bertugas mencari informasi dan tetap bekerja di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. Tim lain yang terdiri dari tokoh masyarakat juga bertugas melakukan pendekatan dan komunikasi secara informal dengan pihak penyandera. Pendekatan yang dilakukan Indonesia yakni dari pendekatan politik, sosial dan ekonomi, serta pendekatan kebudayaan. Pendekatan tersebut berbentuk upaya menjalin hubungan yang baik dengan Filipina selaku negara yang mempunyai wewenang dalam membebaskan sandera karena sandera berada di wilayah Filipina. Selain itu pendekatan lain berbentuk pemberian beasiswa kepada anak-anak di Mindanao. Pendekatan budaya dilakukan dengan latar belakang mayoritas penduduk Indonesia yang juga beragama muslim, dan adanya negosiasi pihak dengan masyarakat muslim di Mindanao untuk menjalin komunikasi demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Diplomasi total Indonesia terbukti

membuahkan hasil dengan bebasnya kesepuluh sandera yang ditawan oleh Abu Sayyaf.